

ANALISIS PARPOL KOALISI PENDUKUNG PEMERINTAHAN JOKOWI TERHADAP PEMERINTAHAN BARU PASCA PEMILIHAN PRESIDEN 2024

Djoni Gunanto¹, Imal Istimal², Fikri Habibi³

¹ Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, ² Manajemen, ITB Ahmad Dahlan Jakarta, ³ Administrasi Negara, Universitas Serang Raya

Abstract

Based on the results of the 2024 general election and the decision of the General Election Commission (KPU), the election recapitulation for the legislative (pileg) and presidential (pilpres) elections has been finalised. The pair of Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka obtained 96,214,691 votes, thereby securing victory. Consequently, the Ganjar Pranowo-Mahfud MD and Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin pairs suffered defeat. This defeat has prompted the losing parties to engage in political manoeuvres, such as joining forces with the winners of the 2024 presidential and vice-presidential elections, to benefit their own parties. Nasdem and PKB joining the Prabowo-Gibran government coalition have influenced the latest dynamics of national political consolidation following the election. The entry of these two key Coalition for Change parties automatically strengthens the government coalition's foothold in the legislative branch. This research employs a descriptive, qualitative approach. This approach is used in problem analysis to obtain a deep and comprehensive understanding of the phenomena experienced by the research subjects. The findings suggest that the political party coalition within the Prabowo-Gibran cabinet reflects Jokowi's lingering power dynamics. However, the large coalition influences cabinet formation by using the political system of reciprocity as the basis for power distribution. This results in positions being filled more based on party interests than on the competence of each individual. Consequently, the efficiency of the cabinet and the government as a whole decreases because those in positions of power are not experts in their fields but are placed there for power interests.

Keywords: Analysis, Political Parties, Coalition, Post, Presidential Election

Article history:

Submission: April 2024

Revised: May 2024

Accepted: May 2024

Published: June 2024

***Corresponding author**

Email: djoni.gunanto80@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada periode pemerintahan 2019-2024, koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendominasi parlemen. Selama sekitar empat tahun, tujuh dari sembilan parpol pendukung pemerintah menguasai 471 dari total 575 kursi di DPR. Kekuatan itu bertambah setelah Demokrat bergabung beberapa pekan lalu sehingga penguasaan kursi di lembaga legislatif itu mencapai 525 kursi.

Namun pada pemilu tahun 2024, beberapa partai mengambil langkah berbeda dengan mengajukan calon masing-masing, terdapat tiga pasangan yang memenuhi syarat presidential threshold, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pencalonan calon presiden mengharuskan pengusung memiliki suara yang memenuhi syarat ambang batas pencalonan capres dan cawapres atau presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Ketiga pasangan calon telah memenuhi ketentuan pasal 220 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang di mana partai politik atau gabungan partai politik bisa mendaftarkan bakal pasangan calon, yaitu telah memenuhi ketentuan 25% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftar hari Kamis 19 Oktober 2023 pukul 09.36 WIB, diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah kursi DPR Pemilu 2019 yakni 167 kursi atau 29,04%.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendaftar hari Kamis 19 Oktober 2023 pukul 12.20 WIB, diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat dengan jumlah suara sah Pemilu 2019 sejumlah 39.276.935 atau 28,06%.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendaftar hari Rabu 25 Oktober 2023 pukul 11.20 WIB, diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garda Republik Indonesia dengan jumlah suara sah Pemilu 2019 sejumlah 59.726.503 atau 42,67%.

Berdasarkan hasil pemilihan umum dan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan umum baik pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024 pada hari ini, Rabu (20/3/2024). Dalam rekapitulasi Pilpres 2024 sebesar 164.270.475. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59%. Pasangan Anies-Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 atau 24,95% dari suara sah. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengumpulkan 27.050.878 suara atau 16,47% dari suara sah.

Kekalahan capres-cawapres yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di Pilpres 2024 dan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar yang di isung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Membuat partai-partai pengusung melakukan manuver politik atau disebut dengan pendekatan politik untuk menemukan haluan baru yang dapat menguntungkan partainya dengan acara bergabung dengan pemenang capres dan cawapres 2024.

Rencana bergabungnya partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju membuat koalisi pemerintahan ke depan menjadi kelewat gemuk. Bagi demokrasi, kuatnya cengkeraman di dua

kaki pemerintahan, yakni legislatif dan eksekutif, akan menampilkan mekanisme kontrol. Tak hanya itu, meski rumput di dalam koalisi pemerintahan tampak lebih hijau, studi menunjukkan bahwa langkah bergabung justru bisa menjadi bumerang bagi partai yang sebelumnya berbeda kubu.

Kabar bergabungnya Nasdem dan PKB ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran mewarnai dinamika terbaru konsolidasi politik nasional pascapemilu. Masuknya dua partai punggawa Koalisi Perubahan ini otomatis menambah dalamnya pijakan koalisi pemerintah eksekutif dalam ruang legislatif.

Melihat hal ini, Muller dan Strom mengatakan partai memiliki dua tujuan utama, yaitu, pertama untuk bertahan hidup. Kedua untuk mendapatkan kesuksesan. Kedua poin tersebut memang bersifat relatif pada tiap partai. Namun hal itulah yang menjadi tujuan dari berdiri dan eksistensi partai politik. Berdasarkan dua hal tersebut, kita dapat melihat orientasi partai politik. Berdasarkan pendekatan berbasis studi perilaku dan pilihan rasional. Kaare Storm, membagi orientasi partai dalam tiga model yaitu policy seeking, votes seeking, dan office seeking (dalam Mellaz dan Kartawidjaja, 2018).

Memudarnya ideologi dalam konstelasi politik pasca reformasi, membuat parpol cenderung pragmatis dan transaksional. Hal ini menjadikan ideologi dan platform politik tidak lagi menjadi pijakan utama dalam berkongres. Semua partai dalam pemilu akhirnya cenderung ke "tengah" atau lebih moderat, dan berebut suara dari ceruk yang sama dengan partai-partai yang lain. Hal ini yang juga terlihat dalam pembentukan koalisi untuk mendukung calon presiden dan calon wakil presiden.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk metode penelitian, pendekatan kualitatif digunakan dalam analisis masalah yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pandangan, kepercayaan, dan motivasi, serta faktor-faktor lain secara menyeluruh dengan memakai metode deskripsi melalui kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu yang alami (Moleong, 2008). Penelitian ini berfokus metode studi kasus, di mana studi kasus adalah teknik penelitian yang mendalam satu unit masalah atau objek untuk menghasilkan deskripsi yang mendalam, kaya, luas, dan menyeluruh. Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif diterapkan dengan menggunakan studi kasus yang bersifat instrumental (instrumental case study) (Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln 2009: 301), di mana kasus yang dianalisis adalah Parpol Koalisi Pendukung Pemerintahan Jokowi Terhadap Pemerintahan Baru Pasca Pemilihan Presiden 2024 . Kasus ini dianggap menarik untuk memberikan wawasan dalam memahami dasar-dasar pembentukan koalisi antar partai politik.

HASIL DAN DISKUSI

Pembentukan koalisi politik di Indonesia sejatinya memiliki dasar hukum yang solid. Hal ini tercermin dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa "Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengikuti pemilihan umum sebelum pemilu berlangsung."

Sebagaimana dijelaskan oleh Andrew Heywood (2000), koalisi merupakan

penggabungan beberapa partai politik yang berbeda, yang bersama-sama menciptakan kesepakatan bersama dan memiliki pandangan mengenai kepentingan atau ancaman dalam evaluasi kondisi negara di masa mendatang. Koalisi juga bisa diartikan sebagai persetujuan resmi antara dua partai politik atau lebih untuk memastikan kekuasaan pemerintah dengan dukungan mayoritas. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sistem multipartai di Indonesia, menciptakan koalisi yang stabil untuk pemerintahan presiden jauh lebih menantang, karena menurut penelitian Scott Mainwaring, presiden yang terpilih dari partai dominan jarang sekali memperoleh mayoritas di parlemen. Akibatnya, hal ini memaksa presiden yang berasal dari partai minoritas untuk memperkuat posisinya.

Efriza (2004) menyatakan bahwa alasan umum di balik pembentukan koalisi adalah koalisi yang bersifat taktis. Koalisi ini tidak dibentuk untuk memenuhi tujuan ideologis dan visi dari partai-partai politik. Struktur koalisi ini tidak didasarkan pada prinsip keseimbangan, sehingga kekuasaan cenderung dikuasai oleh partai politik yang memiliki ukuran lebih besar. Alasan di balik koalisi ini sangat sederhana. Politik uang atau praktik politik dagang sapi merupakan dua ilustrasi dari pendekatan pragmatis yang sayangnya menjadi landasan dalam pembentukan koalisi.

Dalam teori koalisi di ranah politik, tidak semua partai politik layak untuk berkolaborasi sebagai rekan dalam koalisi, terutama dalam pembentukan kabinet. Hanya partai-partai tertentu yang mampu membentuk koalisi dengan cara yang efektif dan bermanfaat untuk mempertahankan serta mengembangkan sistem kepartaian di suatu negara. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk memperkuat sistem presidensial ialah melalui penyederhanaan partai politik dengan menetapkan ambang batas untuk pencalonan presiden. Tujuan dari ini adalah menciptakan pemerintahan yang kokoh sehingga ketika pemerintah sedang berjalan, dapat mengambil keputusan tanpa kendala terkait dengan lembaga legislatif. Dengan adanya ambang batas presiden, partai politik berhak untuk mencalonkan presiden dan wakilnya apabila partai politik atau aliansi partai politik tersebut memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara yang sah secara nasional dalam pemilihan legislatif yang lalu.

Koalisi Pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf didirikan oleh sepuluh partai politik dengan membentuk koalisi, antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Martinus Bersama (PMB), Partai Johanes Kekuatan (PJK), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Peta Politik Pilpres 2019

Pendukung Joko Widodo-Maruf Amin



Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno



Sumber: diakses melalui laman KPU RI

Pada fase kedua kepemimpinan Jokowi, hampir seluruh partai politik bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Sebagai pengingat, lawan politik Jokowi dalam pemilihan presiden 2019 adalah Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan beberapa partai kecil lainnya. Setelah pemilihan presiden 2019, koalisi yang dibentuk untuk mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dibubarkan. Jokowi mengambil langkah strategis dengan mendekati lawan politiknya, Prabowo dan Sandiaga, secara bertahap untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Prabowo lebih dahulu diberikan posisi sebagai Menteri Pertahanan, diikuti oleh Sandiaga yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan demikian, Partai Gerindra resmi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sementara itu, partai oposisi hanya menyisakan PKS, Demokrat, dan PAN. Namun, pada bulan Agustus 2021, pemimpin PAN diundang oleh Jokowi ke Istana, bersama sejumlah pemimpin partai koalisi lainnya. Dengan itu, PAN secara resmi menjadi sahabat baru dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Akibatnya, partai oposisi hanya tersisa PKS dan Demokrat. Penambahan PAN dalam pemerintahan ini membuat spekulasi akan terjadinya reshuffle menjadi semakin kuat, meskipun hingga kini Jokowi belum melakukan perubahan susunan menteri kabinet untuk memberikan kuota kursi menteri kepada PAN.

Parpol parlemen menjadi kunci koalisi

Parpol yang lolos ambang batas pada Pemilu 2024 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang meraih 25.387.279 atau 16,72 persen dari total 151.796.631 suara sah nasional, Partai Golkar dengan 23.208.654 suara sah (15,28 persen), dan Partai Gerindra dengan raihan 20.071.708 suara sah (13,22 persen).

Selain ketiga parpol itu, ada pula Partai Kebangkitan Bangsa yang meraih 16.115.665 suara sah (10,61 persen), Partai Nasdem dengan 14.660.516 suara sah (9,66

persen), dan Partai Keadilan Sejahtera yang meraih 12.781.353 suara sah (8,42 persen). Menyusul di dua posisi terakhir ada Partai Demokrat dengan raihan 11.283.160 suara sah (7,43 persen) dan Partai Amanat Nasional yang memperoleh 10.984.003 (7,24 persen).



Sumber : Komisi Pemilihan Umum, Diolah Litbang Kompas

Dari kedelapan partai tersebut, empat di antaranya merupakan pengusung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memenangi Pemilihan Presiden 2024. Mulai dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN. Jika diakumulasi, perolehan suara

keempat parpol tersebut sebesar 43,17 persen, yang akan dikonversikan menjadi perolehan kursi di DPR. Pada periode 2024-2029, terdapat 580 kursi di parlemen.

Di luar Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, empat parpol lain merupakan pengusung dua pasangan kandidat rival Prabowo-Gibran. PDI-P merupakan pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sementara Nasdem, PKB, dan PKS mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Meski belum dikonversikan ke jumlah kursi yang akan didapatkan, akumulasi perolehan suara parpol-parpol tersebut sedikit lebih tinggi ketimbang para pengusung Prabowo-Gibran, yakni 45,41 persen.

Konstelasi politik di parlemen itu berbeda dengan hasil Pemilu 2019. Pada periode pemerintahan 2019-2024, koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendominasi parlemen. Selama sekitar empat tahun, tujuh dari sembilan parpol pendukung pemerintah menguasai 471 dari total 575 kursi di DPR. Kekuatan itu bertambah setelah Demokrat bergabung beberapa pekan lalu sehingga penguasaan kursi di lembaga legislatif itu mencapai 525 kursi.

Dinamika Koalisi Partai

Dinamika pembentukan koalisi partai-partai dalam pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 semakin terlihat mendekati periode pendaftaran calon. Pergerakan koalisi mulai menunjukkan intensitas yang tinggi, terutama terlihat dalam hubungan antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dikenal sebagai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Pada awalnya, koalisi ini terkesan solid, namun mulai melemah ketika Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar memutuskan untuk bergabung ke dalam koalisi ini.

Masuknya PAN dan Partai Golkar menciptakan dinamika politik baru di dalam koalisi, yang akhirnya mengakibatkan perubahan nama dari KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Perubahan ini membawa konsekuensi politik yang signifikan, terutama bagi PKB, yang merasa diabaikan dalam pergeseran ini. Ketika nama KIM diumumkan sebagai identitas baru koalisi Gerindra, PAN, dan Partai Golkar, iklan tersebut dilakukan tanpa kehadiran perwakilan dari PKB.

Sebelumnya, koalisi yang pertama kali runtuh adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang melibatkan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PAN. Namun, PPP mengambil langkah sendiri dengan meninggalkan koalisi untuk bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Keputusan ini memaksa PAN dan Golkar untuk bergabung dengan KKIR bersama Gerindra dan PKB, yang pada gilirannya menyebabkan PKB tersisih dari koalisi yang bermitra dengan Gerindra.

Kerapuhan juga dialami oleh Koalisi Perubahan, atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang terdiri dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Dalam sebuah pidato, Ketua Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan bahwa Partai Demokrat bergabung dengan KIM. Dengan kehadiran partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, dukungan untuk

Prabowo semakin menguat.

Keputusan Partai Demokrat untuk mundur dari KPP tidak lepas dari perselisihan internal, terutama mengenai pencalonan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan cawapres-cawapres. Ketidakpuasan terhadap penempatan AHY berperan besar dalam keputusan ini, yang dipicu oleh manuver dari Partai Nasdem dan Anies Baswedan yang kurang menghargai keterlibatan Partai Demokrat. Kesan bahwa koalisi ini lebih fokus sebagai oposisi pemerintah semakin menjadi nyata.

Dalam langkah politik selanjutnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden kemudian menunjuk Muhammin Iskandar dari PKB sebagai calon wakil presidennya. Keputusan ini memberikan kejelasan mengenai pasangan calon dalam koalisi tersebut, yang kini didukung oleh tiga partai politik di parlemen: Partai Nasdem, PKB, dan PKS.

Di sisi lain, Ganjar Pranowo, yang dicalonkan oleh PDIP, memilih untuk tidak mengusung calon sendiri dan mengalihkan dukungan kepada PPP, yang memiliki 19 kursi di parlemen. Keputusan PPP untuk meninggalkan KIB dan mendukung capres dari PDIP ini pun mendorong dua partai lainnya, yaitu PAN dan Golkar, untuk menyeberang ke kubu KKIR hingga terbentuklah Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Akhirnya, tiga koalisi ini berhasil memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. Koalisi Prabowo Subianto memperoleh dukungan terbanyak, yaitu dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, Golkar, dan PAN, dengan total 261 kursi di parlemen. Di urutan kedua, Anies Baswedan didukung oleh 167 kursi, dengan dukungan dari Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Sementara itu, Ganjar Pranowo meraih 147 kursi di parlemen, diusung oleh PDIP dan PPP. Peta dukungan ini menunjukkan bahwa koalisi Prabowo Subianto menguasai 43% suara nasional, sedangkan Anies Baswedan mendapatkan 30%, dan koalisi Ganjar Pranowo memperoleh 27%.

Analisis Parpol Koalisi Pendukung

Kalau dilihat dari Koalisi secara faktual dilapangan diikuti oleh dua karakter. **Pertama**, *office seeking* (memburu kursi di kabinet). Perilaku partai dalam koalisi lebih didasarkan pada kehendak untuk memperbesar peluang dalam representasi diri mereka di kabinet pemerintahan yang dibentuk. Dalam memilih mitra koalisi, para elite partai politik cenderung memaksimalkan proses negosiasi dalam power sharing, bila melihat kecondongan ini ternyata partai-partai di Indonesia hari ini dominan kepada *office seeking*.

Kedua, karakter *vote seeking*. Di mana partai politik dalam membentuk koalisi lebih dilandasi dengan tujuan memenangkan pemilihan. Modus menang pemilu itulah yang menyebabkan partai membuka diri seluas-luasnya kepada siapa pun yang akan bergabung (*catch all*), selama kemenangan dapat diraih.

Beberapa Menteri Jokowi yang menjadi Menteri Prabowo Subianto;

1. Erick Thohir (Menteri BUMN) Erick Thohir menjadi Menteri BUMN sejak awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Selain menjadi menteri, popularitasnya semakin naik setelah merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI sejak Februari 2023.
2. Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Sri Mulyani menjadi salah satu srikandi terbaik Indonesia yang masuk pemerintahan 2 presiden berbeda. Sebelum bertugas di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, dia lebih dulu menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden SBY (2005-2010).
3. Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) Berikutnya ada Tito Karnavian. Jenderal polisi purnawirawan bintang 4 ini juga masuk kabinet pemerintahan Presiden Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri.
4. Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan) Zulkifli Hasan adalah Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN). Dia juga menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) sejak 2022, tepatnya setelah menggantikan Muhammad Luthfi.
5. Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya pernah menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM sampai Agustus 2024. Setelahnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar ini diberi mandat baru oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri ESDM.
6. Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian) Kemudian, ada nama Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia adalah Menteri Perindustrian di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
7. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) Pratikno juga ikut dipanggil Prabowo. Dia merupakan orang paling lama di pemerintahan Presiden Jokowi. Tercatat, Pratikno menjadi Mensesneg sejak Oktober 2014. Artinya, dia sudah bertugas selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.
8. Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono adalah putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia juga menjadi penerus ayahnya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Setelah jalan berliku yang dilalui, AHY masuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Februari 2024. Dia ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto.
9. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) Berikutnya, ada Andi Amran Sulaiman. Dia menjadi Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo pada Oktober 2023.
10. Dito Ariotedjo (Menpora) Dito menjadi Menpora di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sejak April 2023. Waktu itu, kader muda Golkar ini mengisi posisi yang ditinggalkan Zainuddin Amali.
11. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) Budi Gunadi Sadikin menjabat Menteri Kesehatan sejak Desember 2020. Dia menggantikan Terawan Agus Putranto.
12. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan) Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Posisi ini ditempati sejak Desember 2020.

13. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Prabowo juga memanggil Airlangga Hartarto. Mantan Ketum Golkar ini telah menjadi Menko Perekonomian sejak Oktober 2019. Lebih jauh, Airlangga juga pernah menjadi Menteri Perindustrian pemerintahan pertama Presiden Jokowi.
14. Saifullah Yusuf (Menteri Sosial) Selanjutnya, ada nama Saifullah Yusuf. Dia menjadi Menteri Sosial pada September 2024 menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri.
15. Supratman Andi Agtas (Menkumham) Supratman Andi Agtas menjadi Menkumham sejak Agustus 2024. Waktu itu, dia menggantikan Yasonna Laoly.
16. Rosan Roeslani (Menteri Investasi) Kemudian, ada nama Rosan Roeslani. Dia menjadi Menteri Investasi sejak Agustus 2024

Dan sejumlah Para wakil menteri Jokowi yang diinterview Prabowo itu adalah Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra, Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menkominfo Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung, Wakil Menkominfo Nezar Patria, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wakil Menaker Afriansyah Noor, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Perubahan dalam dinamik koalisi untuk Pemilihan Presiden 2024 mulai dirasakan sejak tahun 2022. Ketentuan mengenai ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi landasan untuk memahami bagaimana partai-partai di parlemen berkolaborasi atau membentuk aliansi guna mencapai minimal 20% kursi di DPR atau 25% dari total suara sah di tingkat nasional. Dari hasil suara tersebut, perkembangan koalisi partai politik menjelang Pemilihan Presiden 2024 menunjukkan kecenderungan terbentuknya tiga aliansi, masing-masing mendukung kandidat presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Dalam logika *catch all* (gabungan), bahwa tak ada alasan bagi partai menolak mitra kongsi untuk mengalahkan kompetitor. Konsekuensinya, ideologi bukan sesuatu yang penting, karena yang terpenting baginya adalah memenangkan pertarungan. Inilah jawaban mengapa partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi secara lebar bisa bertemu dan bekerja sama. Pragmatisme Politik masih sangat didominasi dalam realisi politik pasca pemilu tahun 2024, banyak dilakukan partai politik dalam hal kerjasama untuk membangun koalisi atas dasar kepentingan elit dan kekuasaan. Koalisi ini dibangun dengan berdasarkan pragmatisme partai politik, tanpa memperhatikan ideologi partai yang berseberangan satu sama lain karena hal ini dianggap sebagai strategi yang lebih efektif.

Dalam pandangan yang lebih dalam ternyata dominasi para menteri Jokowi di pemerintahan Prabowo ke depan tidak lepas dari campur tangan Joko Widodo. Ini bisa dibaca setelah terjadinya dua pertemuan pribadi antara Jokowi dan Prabowo sebelum pemanggilan para calon menteri dan wakil menteri itu dilakukan. Hal serupa juga disampaikan oleh Analis Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo,

mengakui ada spekulasi bahwa dominasi menteri di era Jokowi mengarah kepada cawe-cawe Jokowi terhadap pembentukan kabinet Prabowo ke depan, apalagi wakil Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, notabene merupakan putra sulungnya Jokowi.

Terdapat juga tindakan “cawe-cawe” yang menjadi sorotan publik dan banyak mendapatkan kritik negatif. Tindakan ini pertama kali dilakukan oleh mantan presiden Joko Widodo untuk secara terang terangan mendukung pasangan calon nomor urut tertentu secara spesifik menimbulkan keresahan publik dan kebingungan politik, terlebih lagi dengan pernyataan bahwa presiden itu boleh memihak dan merupakan hak demokrasi.

Koalisi yang dibangun dengan bersifat pragmatis semata, tentu berdampak terhadap tidak munculnya kompetisi antarpertai politik di parlemen, sehingga tidak tampak perjuangan ideologis partai politik dalam memengaruhi, mengubah, ataupun membentuk kebijakan, serta pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi lunak.

Gaya memerintah yang cenderung akomodatif merupakan paling krusial dalam mengelola sistem presidensial, bisa diasumsikan bahwa sistem presidensial di Indonesia dapat berjalan dengan baik, jika dikelola dengan politik transaksional.

KESIMPULAN

Perubahan dalam dinamik koalisi untuk Pemilihan Presiden 2024 mulai dirasakan sejak tahun 2022. Ketentuan mengenai ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi landasan untuk memahami bagaimana partai-partai di parlemen berkolaborasi atau membentuk aliansi guna mencapai minimal 20% kursi di DPR atau 25% dari total suara sah di tingkat nasional. Dari hasil suara tersebut, perkembangan koalisi partai politik menjelang Pemilihan Presiden 2024 menunjukkan kecenderungan terbentuknya tiga aliansi, masing-masing mendukung kandidat presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Dengan demikian koalisi partai politik dalam kabinet Prabowo Gibran mencerminkan dinamikanya bahwa kekuasaan jokowi masih melekat di dalamnya. Padahal Koalisi besar mempengaruhi pembentukan kabinet dengan seringkali menjadikan sistem politik balas jasasebagai dasar distribusi kekuasaan. Hal ini mengakibatkan penempatan jabatan lebih didasarkan pada kepentingan partai dibandingkan pada kompetensi tiap-tiap individu. Akibatnya, efisiensi kabinet serta pemerintahan secara keseluruhan menurun karena yang menduduki kursi kekuasaan bukanlah yang ahli dalam bidangnya namun karena adanya kepentingan kekuasaan.

REFERENSI

- Mellaz, A., & Kartawidjaja, P. R. (2018). Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik
- E Aspinall & W Berenschot, (2019) Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Cornell University Press.
- Siboy Ahmad, (2021), Implikasi Pola Koalisi Partai Politik terhadap Dinamika

Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia, Perspektif Hukum, Vol. 1 No.1 Mei 2021 : 36 – 58

Strom, Kaare. 1990. Journal of A Behavioural Theory of Competitive Political Parties, American Journal Of Political Science, Vol. 34.

Isaliani Pradhitya Thimoty, (2020), "Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia" Res Publica Vol. 4 No. 2, Mei - Agustus 2020

E Aspinall & W Berenschot, (2019) Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Cornell University Press.

Siboy Ahmad, (2021), Implikasi Pola Koalisi Partai Politik terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia, Perspektif Hukum, Vol. 1 No.1 Mei 2021 : 36 – 58

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/24/pemerintahan-mendatang-jadi-momen-tum-bagi-parpol-lain-sebagai-oposisi>.

<https://www.theindonesianinstitute.com/antara-koalisi-dan-pragmatisme-parpol-pasca-pilpres-2024>

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/02/koalisi-besar-tanpa-oposisi-sebuah-pertaruhan-bagi-demokrasi>

<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/05/03/koalisi-gemuk-akankah-menguntungkan-partai-pendukung>.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/21/hasil-pemilu-2024-dan-berubahnya-peta-kekuatan-politik-di-parlemen>.

<https://nasional.sindonews.com/read/1473457/12/daftar-16-menteri-jokowi-yang-dipanggil-prabowo-masuk-kabinet-pemerintahan-baru-1729008652>.

<https://tirto.id/dominasi-menteri-jokowi-di-kabinet-prabowo-murni-keberlanjutan-g4N>